**BAB I**

**KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP**

**ADMINISTRASI PUBLIK**

1. **PENDAHULUAN**

Bab pertama akan membahas mengenai konsep-konsep dasar dan ruang lingkup administrasi publik. Bab ini menjadi dasar untuk memahami bab-bab berikutnya. Uraian bab ini berisi penjelasan berbagai konsep dasar administrasi publik, mulai dari difinisi administrasi, difinisi publik, difinisi administrasi publik, peran, kegiatan dan tujuan administrasi publik, perbedaan administrasi publik dan administrasi privat/swasta dan ruang lingkup administrasi public.

**Kompetensi Dasar**

Mampu memahami berbagai konsep dasar administrasi publik dan ruang lingkup administrasi public.

**Indikator**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menyebutkan difinisi administrasi, difinisi publik dan difinisi administrasi publik dari pakar/ahli administrasi publik mengacu ke perkembangan paradigma,
2. Mendifinisikan administrasi publik dengan kata-kata sendiri
3. Menyebutkan peran, kegiatan dan tujuan administrasi publik
4. Membedakan administrasi publik dan privat/swasta (barang dan sektor)
5. Menyebutkan ruang lingkup administrasi publik

**Tujuan Pembelajaran**

1. Mendapatkan pemahaman pengetahuan berbagai konsep dasar administrasi public.
2. Mendapatkan pemahaman tentang ruag lingkup administrasi publik
3. **PENYAJIAN MATERI**
4. Konsep-Konsep Dasar Administrasi Publik

Administrasi Publik sebagai salah satu ilmu yang dianalogikan sebagai ilmu terapan dalam ilmu sosial atau disebut juga dengan *social engginering,* merupakan cabang ilmu sosial dan politik di Indonesia. Ilmu ini berkembang pertama kali di Amerika sebagai kepanjangan ilmu administrasi bisnis. Woodrow Wilson sebagai *Founding Father* dari Ilmu Administrasi Publik, melihat bagaimana menjalankan negara dengan prinsip-prinsip yang ada seperti dilakukan di dalam administrasi bisnis. Menjalankan pemerintahan dengan keprofesionalitasan, namun dalam perjalananya administrasi publik tidak dapat lepas dari politik sebagai bagian dari dinamika publik.

Politik sendiri adalah alat untuk mencapai tujuan dari kekuasaan dalam administrasi publik. Alat kekuasaan ini dapat digunakan sebagai kebaikan atau juga sebagai keburukan (malapetaka). Ilmu Administrasi Publik adalah ilmu yang sangat multi dimensi sesuai perkembangan zamanya. Ilmu ini bergerak dari satu pendulum ke pendulum yang lain dan pada akhirnya kembali lagi.

Dibawah ini akan dideskripsikan konsepsi administrasi public yang dimulai dari makna administrasi, makna publik dan makna administrasi public.

Definisi Administrasi

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Selanjutnya, menurut **Dimock & Dimock** (dalam Pasolong,2013:2-3), kata administrasi itu berasal dari kata “*ad*” dan “*minister*” yang berarti juga “*to serve*”. Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan.

Permasalahan pokoknya ialah “siapa” yang harus “melayani” dan “dilayani”? dan “siapa” yang harus “mengatur dan diatur”? Jawaban yang pasti, tidak lain dan tidak bukan ialah “manusia” itu sendiri. Dalam hal ini, ialah manusia sebagai subjek untuk melayani dan manusia pulalah yang menjadi objek untuk dilayani. Manusialah yang harus menjaga keteraturan kehidupan sosialnya dan manusia itu sendiri yang harus memecahkan seluruh permasalahan kehidupan sosialnya. Jelasnya adalah manusia berprilaku melayani dan mengatur dirinya sendiri untuk eksistensi dan tujuan hidupnya, mulai tingkat individual sampai pada tingkat sosial umumnya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi bahan baku administrasi ialah “manusia”. Karena manusia merupakan sumber adanya administrasi. Oleh karena itu, tujuan administrasi ialah semata mata untuk kepentingan manusia, khususnya keberadaannya sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Konsekuensinya ialah administrasi bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi dengan segala kegiatan mulai merencanakan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efisien dan efektif.

Jadi, administrasi ialah suatu fenomena sosial, dan hidup subur di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Di dalam tingkat kehidupan demikian individu mempunyai peranan penting karena sebenarnya publik ialah bentuk kehidupan antar individu dalam suatu sistem, untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap individu berfungsi sebagai sumber daya publik, sekaligus sumber daya administrasi.

Selanjutnya, untuk menyamakan persepsi dan interpretasi tentang apa sesungguhnya yang dimaksud administrasi, dikutip beberapa ndapat pakar administrasi, baik dari pakar luar negri maupun pakar dalam negri sendiri sebagaimana dilansir oleh Pasolong (2013:3) sebagai berikut :

**Herbert A. Simon**, mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

**Leonard D. White**, mendefinisikan adminisrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintahan maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

**Dwight Waldo**, mendefinisikan administrasi adalah suatu upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

**Dimock & Dimock**, mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasij uga mementingkan aspek-aspek kongkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

**S. P. Siagian**, mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

**The Liang Gie**, mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, maka disimpulkan pada dasarnya yang dimaksud administrasi dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: “*Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional*”.

Definisi Publik

Kata publik merupakan kata serapan dari bahasa inggris *public*, bahasa ini sudah digunakan oleh masyarakat yang diindentikan dengan masyarakat. Kata masyarakat ini dalam pengertian umum menyatakan semua kalangan umum yang ditujukan pada keseluruhan rakyat. Namun publik juga sering kita dengar dengan nama dibelakangya yang menegaskan bahwa kata yang didepannya adalah dimiliki publik.

Sebagai contoh kita sering dengar nama: toilet publik (*public toilet*), Pelayanan Publik (*public service*), Kebijakan Publik (*public policy*), Transportasi Publik (*public transport*), Lembaga Publik ( public institustion), Republik (*republic*) dan sebagainya Contoh-contoh dari nama yang diakhiri publik ini sangatlah banyak yang merujuk pada akhiran yang sebenarnya dari kaidah bahasa indonesia merujuk kepada kepemilikan. Sebagai contoh kata “*republic*” yang artinya kembali ke publik, semua persoalan dikembalikan kepada publik atau publik sebagai penguasa tertinggi. Publik disini berarti masyarakat madani baik itu pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari publik atau sekelompok masyarakat yang diberi kewenangan untuk menjalankan amanah publik.

Publik sendiri merupakan padanan yang tepat jika disandingkan dengan administrasi untuk merujuk pada pengelolaan bersama kepentingan publik. Kebalikan dari publik sendiri adalah privat atau kita lebih kenal dengan swasta (partikelir). Swasta sendiri merujuk kepada kepemilikan secara perseorangan atau kelompok dari masyarakat. Namun swasta merupakan bagian dari publik, mengapa, Karena sektor ini bergerak di lingkup publik pada konteks masyarakat indonesia sektor swasta ini diberika penyediaan layanan barang atau jasa yang tidak dapat disediakan oleh publik, sebagai contoh layanan telekomunikasi, walaupun pemerintah indonesia memiliki perusahaan telekomunikasi publik namuntelekomunikasi ini merupakan hal yang bisa dilakukan oleh privat dengan adanya pelayanan yang bersifat kompetitif.

Kata publik sendiri berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Yunani dan Romawi, pada konsep publik dan privat bangsa romawi menyebutnya dengan *res publica* dan *res privat*. Istilah gagasan publik dan privat ini sebagaimana yanag dikutip dari buku Parsons (dalam (Suprayogi,2011:5). Masa Yunani Kuno bisa diekspresikan sebagai istilah *koinion* (yang bsa diartikan sebagai publik) dan i*dion* yang bisa diartikan sebagai privat di era Yunani Kuno.

Batasan antara publik dan privat ini di era modernisasi ini memanglah sangat tipis, namun kita dapat melihat bahwa gagasan publik kini dapat dipertemukan keduanya dengan privat pada gagasan pasar (Parsons, dalam Suprayogi, 2011:5), dimana pasar dapat mempertemukan keduanya dan menghindari konflik kepentingan. Di mana kepentingan individu dan kepentingan publik dapat saling menguntungkan. Di mana jika barang publik, tidak dapat disediakan oleh privat maka dapat disediakan oleh publik. Sebagai contoh adalah layanan tentang angkatan perang, pada konsepsi publik ini tidak dapat disediakan secara persendirian oleh privat namun harus publik yang menyelenggarakan pelayanan ini disisi lain barang “ikan asin” tidak dapat dipenuhi oleh publik namun dapat dipenuhi oleh privat. Sehingga rujkan publik lebih kepada layanan yang mencari mafaat sebesar-besarnya, yang mau tidak mau harus tunduk kepada kepentingan politik mayoritas.

Definisi Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (dalam Keban,2008:3), adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan di koordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage)* keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua ahli tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *publik affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Di dalam kenyataan terdapat variasi persepsi tentang administrasi publik. Seorang ahli, McCurdy (dalam Keban, 2008:3) dalam studi literaturnya mengemukakan, bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain, administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik. Anggapan ini mungkin membingungkan pendefinisian administrasi publik, termasuk ruang lingkupnya. Akan tetapi hal ini justru menunjukkan bahwa dunia administrasi publik itu terus mengalami perkembangan dan justru sulit dipisahkan dari dunia politik.

Istilah administrasi publik juga seringkali diganti oleh para ahli ilmu politik dengan birokrasi. Variasi istilah ini lebih populer karena lebih mudah dipahami dan diamati secara nyata oleh orang awam dari pada istilah administrasi publik.

Selain itu, variasi makna ini mungkin juga berasal dari pengertian “publik” itu sendiri. “Publik” memang dapat diartikan sebagai masyarakat luas sebagai lawan dari individu tetapi “publik” juga menunjuk pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan “lembaga pemerintah”.

Variasi makna administrasi publik dapat dilihat juga dari persepsi orang tentang kata “administrasi publik” itu sendiri. Ada yang menterjemahkan administrasi publik sebagai *administration for public* atau adminisrasi dari publik, ada yang *administration for public* atau adminisrasi untuk publik, bahkan ada yang melihatnya sebagai *administration by* *public* atau administrasi oleh publik. Variasi terjemahan tersebut menarik karena dapat menunjukkan suatu rentangan kemajuan administrasi publik mulai dari administrasi publik yang berparadigma paling tidak demokratis sampai yang paling demokratis, atau dari yang tidak memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat sampai ke yang benar-benar memperhatikan pemberdayaan masyarakat.

Istilah *administration of public* menunjukkan bagaimana pemerintah berperanan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai agen regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah. Kemudian istilah *administration for public* menunjukkan suatu konteks yang lebih maju dari yang pertama diatas, yaitu pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (*service provider*). Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakaat. Meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama kegiatan pemerintah namun pemerintah tidak berupaya memberdayakan publik.

Selanjutnya, istilah *administration by public* merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan untuk itu. Dalam hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada “*empowerment”* yaitu, pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah. Akibatnya masyarakat dapat memiliki tingkat patisipasi yang tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pada pelaksanaan dan penilaian hasil, sementara pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan diri pada urusan-urusan kenegaraan yang bersifat strategis.

Tinjauan terhadap beberapa literatur menunjukkan bahwa belum ada kata sepakat tentang batasan atau definisi “administrasi publik” karena administrasi publik merupakan konsep yang kompleks. Seorang ahli bernama Fesler (dalam Keban,2008:5), misalnya mengemukakan bahwa administrasi publik adalah *the* *administation of government affairs*. Administrasi publik diartikan sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijikan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik. Hal yang serupa diungkapkan oleh Stillman II (dalam Keban,2008:5), yaitu bahwa definisi administrasi publik sangat bervariasi bahkan sulit untuk disepakati. Variasi ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat yang dikutip Stillman II , yang dilansir oleh Keban (2008:5))sebagai berikut:

1. **Dimock, Dimock, & Fox**, administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi\ tersebut melihat administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi, atau serupa dengan bisnis tetapi khusus dalam menghasilkan barang dan pelayanan publik.
2. **Barton & Chappel,** melihat administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menekankan aspek keterlibatan personil dalam memberikan pelayanan kepada publik.
3. **Starling** melihat administrasi publik sebagai semua yang dicapai pemerintah, atau dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Dengan kata lain batasan tersebut menekankan aspek *the accomplishing side of government* dan seleksi kebijakan publik.
4. **Nigro & Nigro,** mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu judikatif, legislatif, dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik; yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta; dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini lebih menekankan proses institusional yaitu bagaimana usaha kerja sama kelompok sebagai kegiatan publik yang benar-benar berbeda dari kegiatan swasta.
5. **Rosenbloom,** memberi batasan administrasi publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan judikatif dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Definisi ini menekankan aspek proses instituional atau kombinasi ketiga jenis kegiatan pemerintah yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.
6. **Nicholas Henry**, memberi batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, definisi ini melihat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pendefinisian administrasi publik, Shafritz dan Russel (dalam Keban,2008:6), berpendapat bahwa adalah sulit memberikan satu definisi administrasi publik yang dapat diterima semua pihak. Karena itu kedua pakar ini memberikan beberapa definisi berdasarkan empat kategori yaitu kategori politik, legal / hukum, manajerial, dan mata pencaharian.

Defini berdasarkan kategori politik melihat administrasi publik sebagai “*what governme does*” (apa yang dikerjakan pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, sebagai implementasi kepentingan publik, dan sebagai kegiataan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan secara individu.

Definisi berdasarkan kategori legal/hukum melihat administrasi publik sebagai penerapan hukum (*law in action*), sebagai regulasi, sebagai kegiatan pemberian sesuatu dari penguasa atau “raja” kepada rakyatnya, dan sebagai bentuk “pengambilan paksa” terhadap pihak-pihak kaya yang merasa dirugikan harus tunduk dan mentaatinya.

Definisi berdasarkan kategori manajerial, administrasi publik dipandang sebagai fungsi eksekutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk sosialisasi dalam manajemen (bagaimana mencapai hasil melalui orang lain), sebagai *mickey mouse* yang dalam prakteknya merupakan bentuk “akal-akalan” untuk menghasilkan sesuatu dengan anggaran yang besar tetapi dengan hasil yang kecil, dan sebagai suatu seni dan bukan ilmu.

Definisi berdasarkan kategori mata pencaharian (*occupational defitions*), administrasi publik merupakan suatu bentuk profesi mulai dari tukang sapu sampai dokter ahli operasi otak di sektor publik dimana semua mereka tidak sadar bahwa mereka adalah administrator publik, sebagai upaya yang cerdik untuk memperebutkan program dan proyek yang dapat didanai pemerintah, sebagai suatu penerapan idealisme dimana orang-orang yang bekerja ingin mewujudkan impian atau idealismenya, dan sebagai bidang akademik yang akan terus memusatkan perhatian nya terhadap seni dan ilmu manajemen untuk diterapkan di sektor publik.

Dari semua batasan ini, maka penulis melihat ada beberapa makna penting yang harus diingat berkenaan dengan hakekat administrasi publik yaitu:

1. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif;
2. Bidang tersebut berkenaaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik;
3. Bidang tersebut juga berkaiatan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah;
4. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi ia *overlapping* dengan administrasi swasta;
5. Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan *public goods dan services*;
6. Bidang ini memiliki teoritis dan praktis.

Dewasa ini administrasi publilk dianggap sebagai menajemen. Seorang ahli bernama Keller, melihat administrasi publik sebagai *a system of management for complex public administrastion*. Owen Hughes (2004:23) mendefinisikan administrasi publik sebagai studi akademik tentang sektor publik. Dalam konteks ini, administrasi publik dipandang sebagai manajemen pengembangan teknologi modern menuju modern *governance*. Definisi ini dipengaruhi oleh gerakan reformasi administrasi pelayanan publik yang dikenal dengan nama *new public management* (NPM). Dan akhir-akhir ini, administrasi publik, lebih dilihat sebagai upaya menghasilkan *integrated public governance* dimana semua pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan publik diintegrasikan berdasakan nilai legalitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, keterandalan, transparasi, keterlibatan dan integritas agar dapat mencapai kehidupan yang lebih demokratis dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat

Peran Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai *the work of goverment* memiliki peran atau pengaruh yang sangat vital dalm suatu negara. Hal ini dapat dipelajari dari literatur-literatur tua karya beberapa pengarang seperti Kerl Polanyi, Grahand Sumner, Wallter Weyl, dan Frederick A.Clevenland (Martin,1998 dalam Keban,2008:15). Berbagai literatur berpendapat bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung pada dinamika administrasi publik. William Graham Sumner, pelopor Darwinan dari Amerika Serikat menggambarkan bahwa dinamika administrasi publik dapat membuat sistem kenegaraan yang ada menjadi lebih buruk. Peran tersebut juga dapat dilihat dari pernyataan Walter Wey, bahwa pemerintahan dapat menyengsarakan masyarakat kalau menerapkan administrasi publik dengan gaya *shadow democracy*. Sebaliknya Frederick A.Clevenland justru menunjukkan peran administrasi publik sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat deengan menciptakan demokrasi. Menurutnya, administrasi publik di adakan untuk memberikan pelayanan pubik dan manfaatnyan dan dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan efektifitas, dan lebih menguntungkan lagi manakala pemerintah dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tangung jawab administrasi publik tersebut, sehingga terbentuk apa yang disebut *organized democracy..* . Pendapat Cleveland yang diungkapkan beberapa puluh tahun silam ini nampaknya sejalan dengan ide Janet Denhardt dan Denhardt (2003), yang melihat bahwa administrasi publik, melalui pelayanan-pelayanan publiknya berperan memberikan atau menciptakan demokrasi. Rondinelli (2007) mengungkapkan bahwa kini peran pemerintah harus diarahkan kepada melayani masyarakat agar mencapai *democracy governance.* Dan hal ini harus dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip *good govermence*, pemanfaatan teknologi, penguatan institusi-institusi publik, partisipasi, pengembangan kapasitas desentralisasi pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan kemitraan sektor publik/swasta.

Meski demikian, sering muncul peran negatif dari administrasi publik. Hal ini dapat diamati secra jelas dinamika yang tidak sehat dari pengaturan dan perubahan jenis departemen, penempatan mentri dan semua jajaran dalam jabatannya, pengaturan persyratan jabatan, mekanisme pengangkatan, pemilihan dan pemberhentian para gubernur, bupati, dan walikota, serta semua sekretaris daerah, kepala dinas, badan dan kantor pada tingkat lokal. Peran tersebut juga dapat dirasakan ketika kualitas para birokrat kunci atau eksekutif seperti mentri dan semua eselon yang ada di pusat atau di daerah tidak memadai, atau penggantian struktur dan fungsi birokrasi mulai dari pusat sampai didaerah dilakukan secara tidak responsif. Mungkin peran negatif yang paling dirasakan adalah ketika terjadi kesalahan dalam pengaturan struktur organisasi publik, proses manajemen, daan pembuatan kebijakan publik yang kurang rasional, dan rendahnya etika dan moral birokrat. Di negara sedang berkembang, peran negatif seperti ini masih nampak dan menjadi salah satu sumber keterbelakangan.

Oleh karena itu administrasi publik merupakan medan, dimana para aparat ikut menangani sektor publik, dan tidak hanya sekedar ikut berpartisipasi secara konvensional dalam Pemilu atau pengambilan keputusan. Pemerintah atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektorp publik, khususnya menyediakan pelayanan bagi kepentingan publik, maka peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara. Selain itu, adminisitrasi publik juga dapat dilihat sebagai ajang dimana dapat disaksikan atau dibuktikan apakah benar para elit-elit birokrasi dan politisi memenuhi janji-janjinya atau membuktikan komitmennya kepada publik yang telah memilih mereka. Karena itu, administrasi publik juga sangat berperan menjaga *public trust.*

Kegiatan Administrasi Publik

Apa yang dikerjakan di dalam dunia administrasi publik adalah yang dikerjakan pemerintah dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan variatif, baik menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan (*public services*), maupun yang berkenaan dengan dengan mengejar ketertinggalan masyarakat lewat program-program pembangunan. Kegiatan pemberian pelayanan publik dapat diamati dari pelayanan rutin dibidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketertiban, perijinan, dan sebagainya. Kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dapat diamati dari penyediaan barang-barang publik seperti, pembangunan ekonomi (sarana dnan pasarana fisik dan sosial), sistem sosial budaya, hukum, politik, dan pembangunan kualitas manusia, yang kesemuaannnya diarahkan untuk mengejar ketertinggalan, pengatasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan pengangguan.

Secara umum, kegiatan ini dapat dilihat dari apa yang secara formal dlakukan oleh lembaga departemen dan non departemen, sementara didaerah adalah dilakukan oleh sekretariat daerah, dinas, badan, dan kantor. Untuk melaksanakan tugas dalam bidang-bidang tersebut, dipekerjakan berbagai macam personel mulai dari penajga malam sampai dokter ahli bedah dirumah sakit umum, atau mulai dari pegawai tanpa bawahan sampai para manajer publik tingkat atas yang memiliki banyak bawahan. Singkatnya kegiatan administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh pejabat struktur atau pemegang eselon yang meminpin suatu unit, maupun oleh pejabat non struktural yang tidak memimpin suatu unit.

Kegiatan-kegiatan ini dapat ditangani sendiri oleh aparat pemerintah, atau melibatkan sektor swasta dan masyarakat, apabila kegiatan ini kompleks sifatnya dan pemerintah kurang mampu melaksakannya, kegiatan tersebut dapat ditawarkan kepada sektor swasta dan masyarakat untuk menanganinya. Kegiatan-kegiatan ini ditangani secara khusus karena menyangkut nilai rasional dan politis. Nilai rasionaltas dalam kegiatan ini menyangkut perhatian terhadap efisiensi, efektifitas dan ke-ekonomian, sedangkan nilai poitis berkenaan dengan keeadilan dan kesejahteraan. Apabila permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat berubah cepat, maka kegiatan-kegiatan tersebut juga akan berubah cepat dan bisa menjadi lebih kompleks lagi.

Secara, khusus, kegiatan administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksaan dari kebijakan publik. Artinya, administrasi publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan pelayanan publik dan publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan pelayanan publik dan penyedianaan barang-barang publik. Memang ada perspsi umum tentang admnistrasi publik yaitu *the manajement of publik affairs.*  Karena itu, kegiatan ini meliputi semua yang dilakukan oleh para majaer publik.

Penulis melihat kegiatan administrasi publik secara lebih komprehensif lagi, yaitu tidak hanya menyangkut aspek manajemen, tetapi juga dimensi-dimensi strategis lainnya seperti penataan kebijakan publik, struktur organisasi, pengembangan moral dan etika, adaptasi lingkungan, dan pengmbangan akuntabilitas kinerja. Alasan yang paling mendasar adalah bahwa *the work of goverment* hanya dapat berhasil apabila dimensi-dimensi tersebut secara memadai dikendalikan dan dibenahi.

Tujuan Administrasi Publik

Kegiatan administrasi publik bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik atau secara akademik dikenal dengan istilah *public interest.* Didalam masyrakat terdapat banyak kepentingan seperti kepentingan publik, pribadi, kelompok, partai (politik), jabatan, dan sebagainya. Namun kepentingan yang seharusnya diperjuangkan oleh para admnistrator publik adalah kepentingan publik. Kepentingan publik sering dikompetisikan dengan kepentingan-kepentingan lain, dan dalam banyak kesempatan dikorbankan. Hal yang dapat tercermin dakam pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, dan dimana dikerjakan, yang seringkali tidak sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyrakat.

Meskipun kepentingan umum merupakan sasaran utama dari kegiatan administrasi publik, tetapi kepentingan umum itu sendiri sering menimbulkan masalah karena ada ketidakjelasan dari konsepnya (Denhardt & Denhardt, 2003). Ada yang mengartikannya sebagaai kepentingan yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan yang dipilih (*elected policy makers*) sebagai mana terdapat dalam administrasi publik lama(klasik). Ini berarti kepentingan publik tidak harus berasal dari masyarakat secara langsung, atau pejabat publik yang ditunjuk untuk memutuskannya. Akibat banyak warga masyrakat yang merasa kecewa ketika apa yang diputuskan tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat yang merasa kecewa ketika apa yang diputuskan tidak sejalan dengan aspirasi mereka.

Ada yang justru melihat kepentingan umum sebagai suatu konsep yang tidak relevan lagi dalam administrasi publik sebagaimana dalam *New Public Management* (NPM) karena telah digantikan oleh koalisi dari kepentingan khusus yang menang. Hal ini dapat dimengerti karena diterimanya prinsip kompetisi dan kewirausahaan serta gaya bisnis swasta kedalam kepemerintahan. Namun demikian, ada yang mendefinisikan kepentingan publik sebagai *shared values* atau nilai-nilai yang disepakati besama oleh masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2003), sebagaimana dinyatakan dalam *The New Publik Service*  (NPS). Istilah *shared values* lebih menggambarkan apa yang dianggap bernilai oleh masyarakat atau komunitas dan dinyatakan langsung oleh masyrakat itu sendiri. Mengacu pada pendapat terakhir ini, maka apa yang secara kolektif diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat, itulah yang disebut sebagai kepentingan publik.

Secara operasional, kepentingan publik ini seringkali menjadi masalah karena dirumuskan melalui proses yang seringkali tidak mencerminkan aspirasi atau keinginan publik. Seringkali, bahkan, mencerminkan aspirasi atau keingianan wakil-wakil rakyat atau pengambil keputusan. Insitusi-insitusi publik seperti legislatif atau eksekutif seringkali mengatas-namakan kepentingan publik ketika mereka hendak memutuskan suatu yang sesungguhnya didorong oleh kepentingan mereka sendiri. Untuk mengontrol kecendrungan negatif tersebut, diperlukan suatu doktrin khusus seperti *good governance,* dimana proses pembuatan keputusan dilangsungkan secara demokratis dan masyarakat memilki akses untuk lebih berpartisiapsi, dan lebih bebas mempertanyakan atau mempersoalkan suatu keputusan eksekutif dan legislatif. Dengan kata lain, kepentingan publik dapat diakomodasikan secara lebih baik bila proses administrasi publik dijalankan secara lebih demokratis.

Perbedaan Ciri-Ciri Administrasi Publik dan Administrasi Privat/Swasta

Administrasi publik memiliki ciri-ciri yang sangat khas yang membedakannya dari administrasi privat, meskipun cukup banyak prinsip yang relatif sama. Perbedaan utama dapat dilihat dari pendapat Appleby (dalam Keban, 2008:20) yang menyatakan bahwa, pemerintah dan swasta/privat sangat berbeda orientasinya. Perbedaan pokoknya terletak pada pihak yang dilayani. Pemerintah melayani kepentingan publik sementara swasta melayani kepentingan swasta/pribadi. Perbedaan ini yang sering menjadi masalah atau menimbulkan konflik dimana pemerintah sering tidak memahami pihak swasta atau dunia swasta, sementara dunia swasta juga tidak memahami peran pemerintah.

Perbedaan penting yang lain dapat juga dilihat dalam literatur kuno yang ditulis oleh Thomas Hobbes pada tahun 1651 berjudul “*The Leviathan*”, dimana dibedakan pihak swasta sebagai pihak yang memiliki *merchant mentality* yang didasarkan pada *selfish interest,* sementara pemerintah diharapkan sebaliknya yaitu didasarkan pada *public interest*. Jadi Hobbes mengharapkan agar pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik,sedangkan pihak swasta bekerja untuk memenuhi kepentingan pribadinya yaitu akumulasi modal atau mencari keuntungan.

Ciri-ciri lain yang membantu menjelaskan perbedaan administrasi public dan privat/swasta , dikemukakan oleh Allison (1987: 517-518), yaitu bahwa administrasi publik:

1. Kurang mendapat sentuhan pasar ( tidak tergantung dari pasar)
2. Kurang otonom, dan terlalu tergantung dari luar atau pengaruh formal
3. Mendapat pengaruh politik sangat kuat, atau tergantung dukungan dari luar
4. Bersifat monopolistis
5. Memberi dampak yang sangat luas
6. Kegiatannya mendapat penilaian dari publik
7. Mendapat harapan dari publik untuk bertindak adil, responsif, tanggung jawab, dan jujur.
8. Memiliki tujuan dan kriteria yang kompleks, kurang jelas,dan tidak begitu mudah diukur
9. Mendapat otoritas yang terbatas, lemah dan para pejabat seringkali memiliki keengganan untuk mendelegasi wewenang, dan terlalu ditekan secara politis dari atasan.
10. Bersifat hati-hati akhirnya menjadi kaku dalam bertindak, dan mengalami perubahan yang relatif cepat karena adanya pengangkatan dan penunjukan personel baru
11. Sulit menentukan insentif berdasarkan *performance*  atau kinerja yang ada
12. Memiliki orang-orang yang berkarakteristik sangat variatif
13. Memiliki orang-orang dengan tingkat kepuasan kerja dan komitmen yang rendah terhadap organisasinya

Pendapat penulis, sebagai suatu disiplin, administrasi publik memberikan berbagai prinsip-prinsip, metode, dan teknik yang rasional, yang dapat dipelajari untuk mencapai tujuan. Hampir semua prinsip tersebut berasal dari dunia bisnis , karena itu tidak semuanya dapat digunakan. Jadi administrasi publik berbeda dengan administrasi privat/ swasta, tidak hanya dalam konteksnya, tetapi juga dalam orientasi nilai. Misalnya, administrasi swasta lebih *profit-oriented* sementara administrasi publik lebih *non profit oriented*; administrasi swasta lebih menekankan rasionalitas berdasarkan *economic man model* sementara administrasi publik lebih menekankan rasionalitas terbatas berdasarkan *administrative man model*; dan administrasi swasta lebih mendapat sentuhan pasar, lebih otonom,dan kurang mendapat pengaruh politik,sedang administrasi publik sebaliknya. Spesifikasinya adalah bahwa cara-cara yang digunakan administrasi publik untuk mencapai tujuan memang dinilai dari segi efisiensi dan efektivitas, namun tingkat efesiensi dan efektivitas tidak harus mencapai titik optimum karena dunia administrasi publik tidak berorientasi pada *profit* semata. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan bahwa administrasi publik juga harus mempertimbangkan nilai lain seperti keadilan dan tanggung jawab terhadap publik (Chandler dan Plano,dalam Keban,2008:20).

1. Ruang Lingkup Administrasi Publik Sebagai Dimensi Penting dalam Administrasi Publik

Cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu strategi/cara untuk melihat cakupan materi atau ruang lingkup administrasi publik dari suatu negara adalah dengan mengamati jenis lembaga-lembaga departemen (kementrian) dan non departemen yang ada dalam suatu negara atau daerah. Dikatakan oleh Chandler dan plano (dalam Keban,2008:8) bahwa, apabila kehidupan manusia menjadi semakin kompleks permasalahnya, maka apa yang dikerjakan pemerintah atau administrasi publik juga semakin kompleks.

Cakupan yang dinamis ini dapat dipelajari dari berbagai literatur khususnya buku-buku teks administrasi publik. Asumsinya, bidang dan isu yang di tulis dalam buku-buku teks tersebut relatif kontemporer dan elementer untuk diperhatikan baik oleh akademis maupun praktisi admnistrasi publik. Beberapa buku teks terkemuka memberikan ruang lingkup sebagai berikut.

Keban (2008:8) melansir berbagai pendapat ahli mengenai ruang lingkup administrasi public.

***Pertama,*** dalam buku teks yang di tulis oleh Nicholas Henry (1995) memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat di lihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri) berikut :

1. Organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen public, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
3. Implementasi, menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi, antara pemerintahan dan etika birokrasi.

***Kedua,*** buku teks yang sangat komprehensif yaitu “*Handbook of public administration*” oleh James L. Perry menguraikan unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Tantangan-tantangan administrasi publik dan bagaimana administrasi publik seharusnya menyesuaikan diri.
2. Sistem administrasi dan organisasi yang efektif.
3. Usaha memperkuat hubungan dengan badan legislatif, badan-badan yang diangkat atau dipilih, dan dengan masyarakat.
4. Bagaimana menyusun kebijakan dan program-program secara sukses.
5. Administrasi perpajakan dan anggaran yang effektif.
6. Manajemen sumber daya manusia.
7. Bagaimana memperbaiki operasi dan pelayanan publik
8. Bagaimana praktek administrasi publik yang profesional dan etis.

Ketiga, buku yang ditulis oleh Shafritz dan Russell (1997) menggambarkan unsur-unsur berikut:

1. Lingkungan politik dan budaya
2. Penerapam lanjutan dari ajaran *reinventing goverment*
3. Hubungan antar kelembagaan pemerintah
4. Perkembangan teori manajemen dan organisasi
5. Perilaku organisasi
6. Managerialisasi dan manajemen kerja
7. Manajemen strategis di sektor publik
8. Kepemimpinan dan akuntabilitas
9. Manajemen personalia dan hubungan kerja
10. Keadilan sosial
11. Manajemen keuangan
12. Auditing, akunting, dan evaluasi
13. Pengahargaan dan etika

Kalau diteliti secara cermati isi buku-buku teks diatas, maka unsur pokok yang harus diperhatikan dan yang menentukan dinamika administrasi publik adalah sebagai berikut:

1. Manajemen faktor internal dan eksternal,
2. Pengaturan struktur organisasi agar kewenangan dan tanggung jawab termasuk perilakunya sesuai kondisi dan tuntutan lingkungan, respons secara benar terhadap kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyrakat dalam bentuk perbuatan keputusan atau kebijakan publik,
3. Pengaturan modal dan etika melalui kode etik agar semua penggunaan kemampuan, kompetensi dan profesi tidak disalahgunakan untuk kepentingan diluar kepentingan publik,
4. Pengenalan karakteristik lingkungan dimana administrasi publik itu beroperasi, baik dalam konteks hubungan antar lembaga negara, lembaga swasta, masyrakat, lingkumgan lain seperti lingkungan politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan
5. Akuntabilitas kinerja yaitu suatu janji kepada publik yang harus dipenuhi atau ditepati, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai kegiatan pelayananan atau pemberian barang-barang publik.

Dengan memperlihatkan begitu banyak unsur yang di pandang penting dalam literatur, maka administrasi publik harus dilihat setidak-tidaknya dari enam dimensi strategis sebagai ruang lingkup administrasi public sebagai berikut:

1. Dimensi kebijakan publik
2. Dimensi struktur publik
3. Dimensi manajemen publik
4. Dimensi etika/tanggungjawab sosial publik
5. Dimensi lingkungan
6. Dimensi kinerja

Dimensi kebijakan publik, menyangkut proses pembuatan keputusan untuk menetukan tujuan dan cara atau alaternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak pada manusia yang memberikan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.

Dimensi struktur organisasi publik, berkenaan dengan pengaturan struktur yang meliputi bentuk unit, pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik) untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya. Proses tersebut dapat diumpamakan dengan sistem organ tubuh manusia, yang memiliki peran dan fungsi tersendiri, dan siap melaksanakan tugasnya, setelah medapat perintah dari otak.

Dimensi manajemen public, menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan (digerakan, diorganisir, dan dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melaluli prinsip-prinsip manajemen. Ini dapat dianalogikan dengan sistem jantung dan urat nadi yang menyalurkan darah keseluruh tubuh termasuk ke organ-organnya agar dapat bergerak dan berfungsi.

Dimensi etika/tanggungjawab social publik memberikan tuntutan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan yang buruk. Ini diibaratkan dengan sistem sensor pada tubuh manusia seperti perasaan, intuisi, dan suara hati nurani yang sering memberi teguran atau mengendalikan diri manusia.

Dimensi lingkungan adalah suasana dan kondisi sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi yang ada yaitu, dimensi struktur organisasi, manajemen, kebijakan, dan tanggung jawab moral. Hal ini diibaratkan dengan dengan suhu atau iklim serta karakteristik lokasi dimana tubuh manusia bertumbuh dan berkembang. Manakala iklim atau suhu serta lokasi kurang cocok dengan tubuh manusia maka tubuh tersebut akan sakit atau terhambat untuk berkembang. Iklim ini tergambar dalam sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya serta teknologi yang mewarnai dinamika administrasi publik dari suatu negara. Karena itu kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan menjadi sangat vital.

Dimensi kinerja public, berangkat dari pertayaan mendasar yang harus dijawab, apakah kebijakan struktur organisasi, manajemen, dan moral dibangun dan dijalankan secara profesional, dan untuk apakah harus disesuaikan dengan lingkungan. Dengan demikian dimensi terakhir dan paling menentukan dari dunia admnistrasi publik adalah Dimensi Akuntabilitas Kinerja. Dimensi kinerja publik ini memberikan suatu bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan riil pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi publik di suatu negara.

1. **RANGKUMAN**

Administrasi Publik merupakan ilmu terapan dalam ilmu sosial merupakan cabang ilmu sosial dan politik di Indonesia. Ilmu ini berkembang pertama kali di Amerika, dan Woodrow Wilson sebagai *Founding Father* dari Ilmu Administrasi Publik, melihat bagaimana menjalankan negara dengan prinsip-prinsip yang ada seperti dilakukan di dalam administrasi bisnis. Beberapa karakter pokok dari administrasi public adalah : 1) Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif; 2) Bidang tersebut berkenaaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik; 3) Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah; 4) Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi ia *overlapping* dengan administrasi swasta; 5) Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan *public goods dan services*; 6) Bidang ini memiliki teoritis dan praktis. Berikutnya, perkembangan karakter administrasi publick mengaarah kepada gerakan reformasi administrasi pelayanan publik yang dikenal dengan nama *new public management* (NPM). Dan terakhir, administrasi publik, lebih dilihat sebagai upaya menghasilkan *integrated public governance(New Public Service)*

Ada enam dimensi strategis sebagai ruang lingkup administrasi publik sebagai berikut: 1) Dimensi kebijakan publik, 2) Dimensi struktur publik, 3) Dimensi manajemen publik, 4) Dimensi etika/tanggungjawab sosial publik, 5) Dimensi lingkungan, 6) Dimensi kinerja .

1. **LATIHAN**
2. Sebutkan 3 definisi administrasi, 2 difinisi tentang publik dan 3 difiinisi administrasi public dari beberapa ahli/pakar.
3. Deskripsikan difinisi administrasi public dengan menggunakan bahasa anda sendiri.
4. Sebutkan peran, kegiatan dan tujuan dari administrasi public.
5. Identifikasi perbedaan administrasi public dan administrasi privat/swasta
6. Sebutkan ruang lingkup administrasi public.
7. **PUSTAKA RUJUKAN**

Allison,GT.1987. ***Public and Private Man***agement. Pacific Grove,CA. Cole Publishing Company.

Denhardt, Janet dan Denhardt, Robert. 2013. ***Pelayanan Publik Baru : Dari Manajemen Steering Ke Serving.*** Yogyakarta. Kreasi Wacana.

Hughes. O.2004. ***Public Management and Administration : An Introduction***. Third Edition. New York. Palgrave Macmillan.

Keban, Yeremis. 2008. ***Enam Dimensi Strategis Administrasi Publi: Konsep, Teori dan Isu.*** Yogyakarta. Gava Media.

Suprayogi S, Yogi. 2011. ***Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia.*** Yogyakarta. Graha Ilmu

Pasolong, Herbani. 2013. ***Teori Administrasi Publik***. Bandung: Alfabeta.

1. **GLOSSARI**

|  |  |
| --- | --- |
| Kata atau kalimat | Arti atau penjelasan |
| *Founding father* | Pendiri dari administrasi publik, dalam hal ini adalah Woodrow Wilson |
| *Organized democracy* | Demokrasi yang terorganizir sebagai akar pelayanan publik baru, yang menekankan pada kekuatan warganegara, komunitas dan organisasi yang humanis. |
| *Profit Oriented* | Berorientasi pada keuntungan, dalam konteks pembedaan administrasi publik dengan administrasi bisnis/swasta |
| *Non profit* | Tidak berorientasi pada keuntungan, namun lebih kepada pelayanan kepada warga negara |
| *Public trust* | Kepercayaan publik sebagai tujuan dari dari administrasi publik |
| *Public interest.* | Kepentingan publik sebagai fokus dari paradigma terbaru administrasi publik |
| *Public goods dan services* | Merupakan orientasi khusus administrasi publik yang mengendapnkan pelayanan pada masyarakat dalam penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat luas |